

Pengaruh Kapasitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Suyatman¹, Annis Nurfitriana Nihayah²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Semarang

ahmadsuyatman@students.unnes.ac.id¹, annisnurfitriana@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

The capacity of the village head plays a central role in determining the effectiveness of village fund management. As the highest leader at the village level, the village head is expected to be able to carry out government functions effectively, including planning, implementing, and accounting for the use of village funds in a transparent and accountable manner. In the context of Sidomulyo Village, Banjarejo District, the village head's ability to understand regulations, organize village officials, and foster community participation are key factors in creating effective village fund governance. Using a descriptive qualitative approach, this study reveals that the village head's capacity, encompassing knowledge, skills, and commitment, directly contributes to the success of each stage of village fund management. Planning is carried out in a participatory manner through village deliberations, program implementation is aligned with the community's real needs, and reporting is conducted openly through various village information media. Active community participation and a strong culture of mutual cooperation (gotong royong) also strengthen the social oversight system for fund use. These results confirm that the success of village development depends heavily on the synergy between strong village leadership and active community involvement.

Keywords: *village head capacity, village funds, village management, community participation, accountability*

ABSTRAK

Kapasitas kepala desa memegang peran sentral dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, kepala desa diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik, termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, kemampuan kepala desa dalam memahami regulasi, mengorganisasi perangkat desa, serta membangun partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam terciptanya tata kelola dana desa yang efektif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa kapasitas kepala desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan komitmen berkontribusi langsung terhadap keberhasilan setiap tahapan pengelolaan dana desa. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan program sesuai kebutuhan riil masyarakat, serta pelaporan dilakukan secara terbuka melalui berbagai media informasi desa. Partisipasi aktif warga serta budaya gotong royong yang masih kuat turut memperkuat sistem pengawasan sosial terhadap penggunaan dana. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang kuat dan keterlibatan masyarakat yang aktif.

Kata kunci: kapasitas kepala desa, dana desa, pengelolaan desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Desa Sidomulyo di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, merupakan salah satu desa yang masih termasuk dalam kategori desa miskin, dengan sebagian masyarakatnya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa, terutama dalam memanfaatkan dana desa sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki peran sentral dalam upaya mengatasi persoalan tersebut melalui manajemen keuangan desa yang baik, pembangunan yang merata, dan administrasi yang transparan serta akuntabel. Melalui kepemimpinan yang kuat dan partisipatif, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menjadi katalisator untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik mengenai pengaruh kapasitas kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sidomulyo.

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri guna mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (Kemendesdesa P. , 2021). Pada tahun 2022, alokasi dana desa secara nasional mencapai Rp 72 triliun, yang mencerminkan komitmen negara dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas lokal.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh kapasitas kepala desa sebagai aktor utama dalam pemerintahan desa. Kepala desa dituntut tidak hanya memahami aspek regulatif dan administratif, tetapi juga mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat (Permendagri, 2018). Kepala desa yang memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang kuat akan mampu merancang perencanaan pembangunan yang inklusif, melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana (Sutiyo, 2020).

Transparansi menjadi unsur penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Tanpa transparansi, masyarakat sulit mengawasi penggunaan dana, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan (Wulandari, Saputra, & Lestari, 2019). Di sisi lain, akuntabilitas menjamin bahwa setiap pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kepala desa sering kali berdampak pada buruknya dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa (Fitriani, 2021).

Selain itu, tantangan lain dalam pengelolaan dana desa adalah minimnya pelatihan teknis dan pendampingan terhadap aparat desa. Banyak kepala desa dan perangkatnya yang belum menguasai teknik perencanaan berbasis data, mekanisme pelaporan digital, hingga evaluasi program pembangunan (Prabowo, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas melalui pelatihan, supervisi, dan penyediaan teknologi informasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana.

Penguatan kapasitas kepala desa juga berdampak langsung pada aspek sosial dan budaya. Pemimpin yang mampu mengelola dana desa dengan baik akan meningkatkan partisipasi warga, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan kemandirian lokal (Suharto, 2018). Oleh karena itu, kapasitas kepala desa menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kapasitas kepala desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dengan fokus pada studi kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

TINJAUAN LITERATUR

Kapasitas Kepala Desa

Kepala desa memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya desa, termasuk dana desa. Kapasitas kepala desa mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa wajib menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, serta bertanggung jawab atas penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Pendidikan formal, pelatihan, serta pengalaman kerja sangat berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas tersebut. Kepala desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan partisipatif umumnya lebih mampu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sikap terbuka dan kepemimpinan partisipatif juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola program pembangunan desa (Nugroho & Rahmawati, 2020).

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada desa yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas pengelolaan dana desa sangat tergantung pada kapasitas dan integritas kepala desa. Pengelolaan yang baik meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Menurut (Permendagri, 2018), pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa yang mampu mengelola dana dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan lemahnya pengelolaan dapat menyebabkan inefisiensi dan hilangnya kepercayaan publik (Yuliani & Farid, 2021).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Kepala Desa

Beberapa faktor yang memengaruhi kapasitas kepala desa antara lain:

- Pendidikan: Membantu kepala desa memahami peraturan, administrasi, dan kebijakan pembangunan desa (Lestari, 2019).
- Pelatihan: Memberikan pengetahuan teknis dan keterampilan dalam pengelolaan dana serta penyusunan program kerja (Sari & Prasetyo, 2020).
- Pengalaman: Membentuk kecakapan dalam menghadapi masalah serta dalam mengambil keputusan strategis.
- Sikap dan komunikasi: Kepala desa yang komunikatif, terbuka terhadap kritik, dan mengajak partisipasi masyarakat memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi (Ramadhani & Fitria, 2022).
- Dukungan pemerintah dan masyarakat: Fasilitasi dari pemerintah dan partisipasi aktif warga juga menjadi pendukung penting dalam penguatan kapasitas kepala desa (Fitriani & Nugraha, Partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, 2021).

Hubungan Kapasitas Kepala Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara kapasitas kepala desa dengan pengelolaan dana desa. Kepala desa yang memiliki kapasitas tinggi cenderung mampu menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, mengelola anggaran secara tertib, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi.

Menurut (Prabowo & Suryani, 2018), penguatan kapasitas kepala desa berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi dan efektivitas penggunaan dana desa. Kepala desa yang memahami regulasi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik juga lebih mampu menyesuaikan diri dengan tantangan administratif dan sosial yang ada dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kapasitas kepala desa memengaruhi pengelolaan dana desa. Metode ini tidak menggunakan data berupa angka atau statistik, melainkan

lebih menekankan pada proses, makna, dan peran sosial yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap realitas sosial dan dinamika yang berkembang dalam praktik pemerintahan desa secara lebih utuh dan mendalam (Moelong, 2012).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Desa ini dipilih karena secara aktif menerima dan mengelola dana desa, serta memiliki struktur pemerintahan yang lengkap seperti kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aktivitas desa dalam proses pembangunan dan pengelolaan dana yang cukup intensif menjadi alasan utama pemilihan lokasi tersebut.

Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Subjek utama adalah Kepala Desa Sidomulyo, karena ia merupakan aktor sentral dalam pengelolaan dana desa. Selain kepala desa, peneliti juga mewawancarai beberapa perangkat desa seperti sekretaris desa dan kaur keuangan, serta tokoh masyarakat yang memahami konteks sosial dan dinamika pembangunan di desa. Informan-informan ini memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dana desa, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman mereka dalam pengelolaan dana desa, serta dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan interaksi antara kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat. Observasi ini membantu memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi desa, seperti RKPDes, APBDes, laporan realisasi kegiatan, serta dokumentasi musyawarah desa. Dokumen ini digunakan sebagai bukti administratif dan pelengkap informasi dari lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Proses ini meliputi tiga tahapan, yaitu:

- **Reduksi Data:** Menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
- **Penyajian Data:** Menyusun data dalam bentuk naratif atau matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
- **Penarikan Kesimpulan:** Menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah disusun, untuk menghasilkan kesimpulan atas pertanyaan penelitian.

Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data, agar peneliti dapat langsung merefleksikan temuan dan melakukan penggalan data tambahan bila diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, yang berada di wilayah Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah sekitar 180,746 hektar, dengan karakteristik alam berupa lahan pertanian yang subur dan sistem pemukiman yang tersebar. Letaknya yang cukup strategis membuat desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lain di sekitarnya, sehingga memiliki potensi ekonomi dan sosial yang saling terhubung.

Mayoritas penduduk Desa Sidomulyo bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani lahan sendiri maupun buruh tani. Aktivitas pertanian yang dominan menjadikan desa ini sangat bergantung pada keberlangsungan program-program pembangunan yang mampu mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan infrastruktur jalan tani, saluran irigasi, dan akses ke pasar hasil panen (Kemendes, 2021).

Dari sisi kependudukan, Desa Sidomulyo memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cukup berimbang, dengan struktur masyarakat yang masih kental memegang budaya gotong royong dan nilai kekeluargaan. Pembagian kerja di desa ini pun cenderung terbagi secara tradisional, di mana kaum laki-laki dominan di sektor produktif seperti pertanian dan pembangunan fisik, sementara perempuan

banyak terlibat dalam kegiatan rumah tangga dan ekonomi informal seperti industri rumahan dan pasar desa.

Desa ini menjadi objek penelitian karena selain memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang cukup besar, juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa, termasuk permasalahan kapasitas perangkat desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan (Moelong, 2012).

Kapasitas Kepala Desa

Kapasitas kepala desa menjadi salah satu kunci utama dalam mengarahkan keberhasilan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, kapasitas kepala desa diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan komitmen. Ketiga indikator ini merujuk pada konsep kapasitas kelembagaan menurut (UNDP, 1998), yang mencakup kapasitas individu dan organisasi dalam menjalankan tugas secara optimal.

1. Pengetahuan Kepala Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidomulyo memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai tugas, wewenang, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur perencanaan pembangunan desa, dan mekanisme pelaporan. Kepala desa memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Keterampilan Kepala Desa

Dalam aspek keterampilan, kepala desa menunjukkan kemampuan manajerial dan komunikasi yang memadai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2009), bahwa pemimpin yang baik harus mampu mengelola sumber daya manusia dan membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Kepala desa mampu mengkoordinasikan perangkat desa dan masyarakat, menjadi fasilitator musyawarah desa, serta menyusun laporan kegiatan dan keuangan dengan tertib.

3. Komitmen Kepala Desa

Komitmen kepala desa ditunjukkan dari keterlibatannya dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia aktif hadir dalam musyawarah desa, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan. Komitmen ini mencerminkan nilai integritas dan

kepemimpinan transformasional, sebagaimana diuraikan oleh (Bass & Avolio, 2003) di mana pemimpin bukan hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga menjadi panutan moral.

Dengan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala desa Sidomulyo memiliki kapasitas yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di Desa Sidomulyo mengacu pada tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang bersifat partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok tani. Proses ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Usulan masyarakat disusun menjadi RKPDes dan menjadi dasar penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Kegiatan yang dibiayai dana desa terutama difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah desa juga menggunakan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan ekonomi dan bantuan bagi kelompok usaha. Kegiatan ini melibatkan tenaga kerja lokal sebagai bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dianjurkan oleh pemerintah (Kemendes P., 2021).

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sebagai aplikasi resmi dari BPKP dan Kemendagri. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara tertib oleh kaur keuangan dan kepala desa, dengan dukungan dokumen pendukung seperti nota, kuitansi, dan laporan realisasi kegiatan (BPKP, 2020).

4. Pertanggungjawaban

Laporan keuangan dan kegiatan disusun secara berkala dan disampaikan kepada masyarakat serta instansi terkait. Transparansi informasi keuangan dilakukan dengan memasang papan informasi di balai

desa dan media visual lainnya. Ini merupakan bentuk akuntabilitas publik yang penting dalam sistem tata kelola desa yang baik (Mardiasmo, 2009).

Pengaruh Kapasitas Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas kepala desa memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini konsisten dengan teori kapasitas pemerintahan lokal yang disampaikan oleh (Grindle, 1997), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran publik sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kelembagaan lokal.

Kepala desa yang memiliki pemahaman regulatif, keterampilan teknis, dan komitmen moral akan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa yang efektif. Ia tidak hanya mengarahkan jalannya program, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan dalam membangun partisipasi masyarakat juga menunjukkan bahwa **modal sosial** (Putnam, 1993) menjadi kekuatan penting dalam memperkuat hasil-hasil pembangunan berbasis dana desa.

Dengan demikian, hubungan antara kapasitas kepala desa dan pengelolaan dana desa di Desa Sidomulyo menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di level desa merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Sidomulyo memiliki sistem pengelolaan dana desa yang secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, telah dilaksanakan dengan prosedur yang cukup baik dan melibatkan unsur masyarakat secara aktif. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, kepala desa memainkan peran sentral yang sangat menentukan arah dan keberhasilan program-program pembangunan. Kepala desa di Desa Sidomulyo menunjukkan kapasitas yang baik, yang tercermin dari pemahamannya terhadap regulasi, keterampilannya dalam mengorganisir perangkat dan masyarakat, serta komitmennya dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan terbuka. Ia mampu mengarahkan jalannya pembangunan dengan kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif.

Penelitian ini juga menguatkan bahwa kapasitas kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Kepala desa yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan semangat pengabdian yang tinggi dapat mendorong proses perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya berhenti pada peran kepala desa, keberhasilan pengelolaan

dana desa juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah desa berhasil menciptakan kepercayaan dan keterlibatan warga. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta sebagai pengawas, pelaksana, bahkan perencana program-program pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kepala desa memiliki kapasitas yang memadai dan masyarakat dilibatkan secara aktif, maka pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sinergi antara kepemimpinan yang kuat dan masyarakat yang terlibat secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B., & Avolio, B. (2003). *Transformational Leadership and Organizational Culture*. Sage Publications.
- BPKP. (2020). *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi Terbaru*. Jakarta: BPKP.
- Fitriani, N. (2021). Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 35-45.
- Fitriani, N., & Nugraha, A. (2021). Partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 102-110.
- Grindle, M. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard Institute for International Development.
- Kemendesa. (2021). *Padat Karya Tunai Desa dalam Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kemendesa, P. (2021). *Padat Karya Tunai Desa dalam Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Lestari, E. (2019). Pengaruh pendidikan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144-151.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moelong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Rahmawati, D. (2020). Kapasitas kepala desa dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa*, 3(1), 22-30.
- Permendagri. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Prabowo, A. (2020). Tantangan implementasi sistem keuangan desa digital. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 5(1), 67-75.
- Prabowo, R., & Suryani, A. (2018). Pengaruh kapasitas kepala desa terhadap transparansi keuangan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 89-97.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Ramadhani, R., & Fitria, I. (2022). Peran komunikasi kepala desa dalam penguatan partisipasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55-64.
- Sari, & Prasetyo, H. (2020). Efektivitas pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparatur pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(3), 88-93.
- Suharto, E. (2018). *Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: refika Aditama.
- Sutiyo, M. (2020). Tata kelola dana desa dan peran kepala desa dalam good governance. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Daerah*, 9 (1), 13-25.
- UNDP. (1998). *Capacity Assessment and Development in a Systems and Strategic Management Context*. New York: United Nations Development Programme.
- Wulandari. (n.d.).
- Wulandari, S. &. (2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 77-90.
- Wulandari, Saputra, & Lestari. (2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 77-90.
- Yuliani, S., & Farid, M. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa dalam perspektif tata kelola yang baik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 110-120.